

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Pasuruan

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pasuruan termasuk dari bagian Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat $11,30^{\circ} - 12,30^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,30^{\circ} - 8,30^{\circ}$ Lintang Selatan. Wilayah ini secara ekonomi mempunyai letak yang sangat strategis karena merupakan persimpangan jalan dari Surabaya-Malang, Surabaya-Probolinggo, maupun Probolinggo-Malang, yang selalu melalui jalur wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan letak yang demikian ini Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang strategis sekaligus merupakan daerah yang berpotensi dan rawan dengan kecelakaan lalulintas darat. Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan seluruhnya sejumlah $\pm 147.401,50$ Ha atau $1.474,02$ Km² yang terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan, dataran rendah, dan pantai, yang dapat di ketahui sebagai berikut:

- a) Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180-3000 mdpl, daerah ini membentang dibagian selatan dan barat meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tukur, Purwodadi, Prigen dan Gempol;
- b) Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6-9 mdpl, daerah ini membentang di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur;

- c) Daerah pantai dengan ketinggian antara 2-8 mdpl, daerah ini membentang dibagian utara Pasuruan yang meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, dan Bangil.

Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan klasifikasi Schimdit dan Fergusan. Sebagian besar kecamatan yang ada pada Kabupaten Pasuruan beriklim C dan selebihnya tipe B. temperatur sebagian besar wilayah antara 24-32 C, sedangkan untuk wilayah diatas 2.770 meter temperatur terendah mencapai 5 C ada di Kecamatan Tosari. Variasi hujan rata-rata dibawah 1500-2500 mm. Angin barat dan timur kecepatan rata-rata 12-30 knot. Secara administratif luas Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,020 Km² yang dibagi ke dalam 24 (dua puluh empat) wilayah kecamatan, 341 desa dan 24 kelurahan. Dengan batas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura;
- b) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
- c) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- d) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat mengetahui potensi dan kendala fisik perkembangan suatu kawasan/wilayah. Kondisi topografi erat kaitannya dengan letak ketinggian dan kemiringan lereng suatu lahan. Secara

umum dapat di diskripsikan bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan terhampar mulai dari daerah pantai dengan ketinggian 0 mdpl dibagian utara sampai pegunungan dengan ketinggian >2.000 m dpl dibagian selatan dengan morfologi bentang alam yang bervariasi mulai dari kemiringan lereng relative datar / sedikit bergelombang (0-8%) sampai dengan kelerengan yang cukup curam (>45%). Kondisi topografi Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 4 yaitu wilayah pantai, dataran rendah, perbukitan, pegunungan, dan ketinggian. Keadaan ketinggian kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a) Ketinggian 0 – 12,5 mdpl, meliputi luasan 18.819,04 ha atau sekitar 12,8% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Lekok dan Nguling.
- b) Ketinggian 12,5 – 25 mdpl, meliputi luasan 11.356,5 ha atau sekitar 7,7 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, Nguling dan Kejayan.
- c) Ketinggian 25 – 50 mdpl, meliputi luasan 16.353,6 ha atau sekitar 11,1 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Gondangwetan, Winongan, Grati, Lekok, Nguling, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan dan Kejayan.

- d) Ketinggian 50 – 100 mdpl, meliputi luasan 13.448,2 ha atau sekitar 9,1% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Rembang, Grati, Nguling, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan, Lumbang dan Kejayan.
- e) Ketinggian 100 – 500 mdpl, meliputi luasan 39.011,2 ha atau sekitar 26,5% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kec. Gempol, Beji, Winongan, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan, Lumbang, Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen dan Kejayan.
- f) Ketinggian 500 – 1.000 mdpl, meliputi luasan 21.877,2 ha atau sekitar 14,8% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kec. Gempol, Pasrepan, Lumbang, Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen dan Tosari.
- g) Ketinggian 1.000 – 2.000 mdpl, meliputi luasan 18.615,1 ha atau sekitar 12,6% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kec. Gempol, Lumbang, Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen dan Tosari.
- h) Ketinggian di atas 2.000 mdpl, meliputi luasan 7.920,8 ha atau sekitar 5,4% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup pada sebagian wilayah Kec. Lumbang, Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen dan Tosari.

Selain itu secara Geomorfologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas 5 (lima) bagian, yaitu kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan, dataran pasir dan dataran rendah, masing-masing sebagai berikut :

- a) Kerucut gunung api disebelah barat dan tenggara, dengan ciri bentuk strato dan kerucut gunung api, berketinggian antara 2.000 – 3.350 mdpl. Puncaknya antara lain: Gunung Welirang, Arjuno, Ringgit dan Bromo.
- b) Pegunungan, ada di bagian barat dan barat laut, bercirikan strato dengan ketinggian 600 – 2000 mdpl. Puncaknya antara lain adalah Gunung Penanggungan. Daerah ini sebagian besar masih tertutup semak dan hutan *tropic* dengan batuan piroklastika dan epiklastika.
- c) Perbukitan, bercirikan gelombang deretan bukit, pegunungan, atau pematang, berketinggian 25–600 mdpl. Puncak utamanya Gunung Baung, Gunung Tinggi, Gunung Pule, dengan aliran sungai yang menonjol adalah Sungai Welang. Daerah ini sebagian merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang membentang dari wilayah Kecamatan Tosari dan Kecamatan Puspo sampai ke arah barat yaitu Kecamatan Tukur, Purwodadi dan Prigen.
- d) Dataran Pasir, terletak di dasar kawah Tengger berbentuk tapal kuda mengelilingi Gunung Bromo, dengan ketinggian 200 – 2100 mdpl ;
- e) Dataran rendah, membentang di daerah bagian utara dan sekitar pantai utara. Dengan ketinggian 0 – 25 mdpl memiliki endapan alluvium yang membentang dari timur, yaitu wilayah Kecamatan Nguling, ke arah barat

yaitu Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil. Sebagian besar merupakan lahan pertanian, pertambakan, dan perkebunan, dengan sungai utamanya adalah Sungai Rejoso, Sungai Masangan dan Sungai Kedunglarangan.

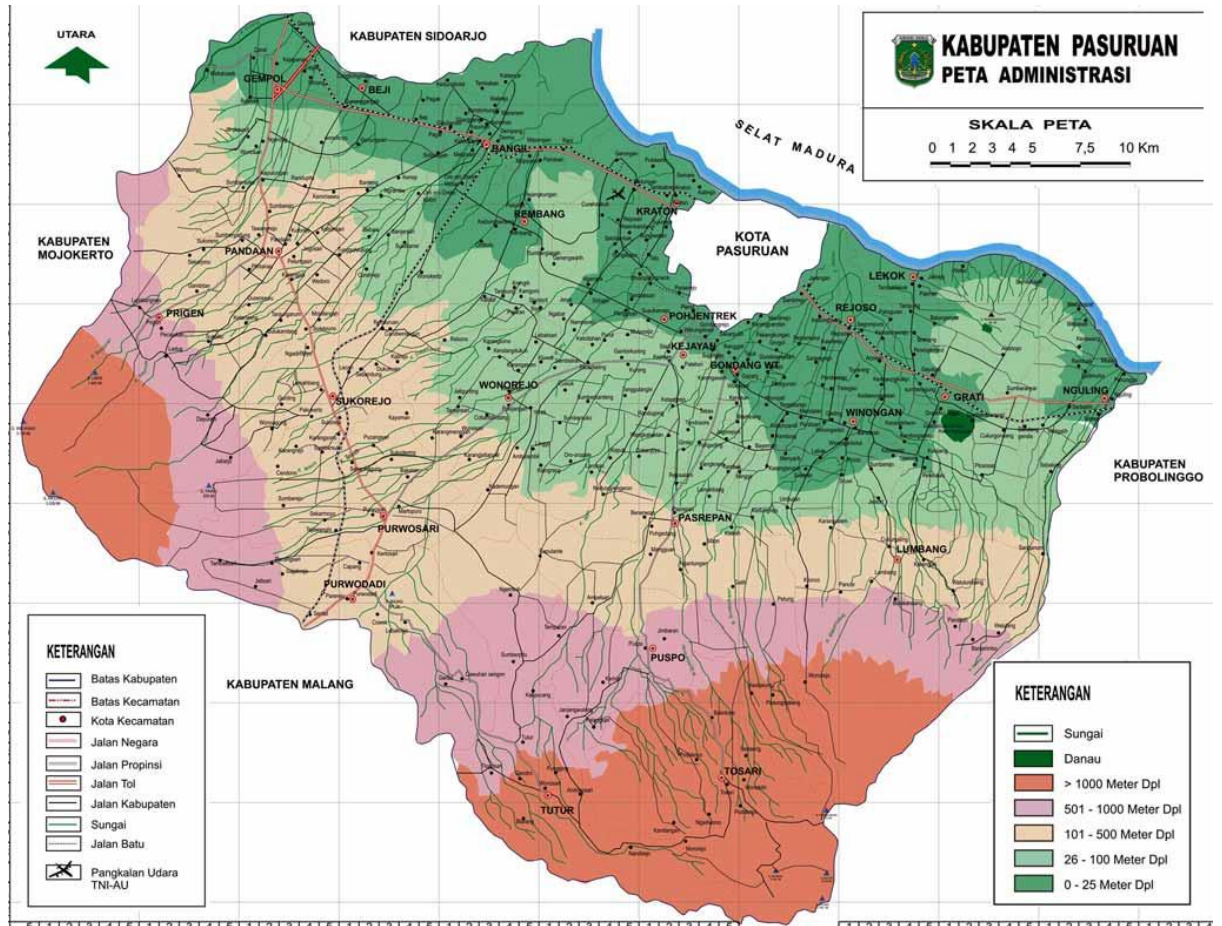
Bilamana ditinjau dari jenis Geologi, maka wilayah di Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya akan bahan tambang galian type C (pasir dan batu). Kita ketahui bahwa pada saat ini penggalian tambang C di wilayah perbukitan/pegunungan yang banyak mengandung pasir dilakukan oleh warga maupun perusahaan swasta secara cukup besar dan cenderung liar. Bilamana penggalian tersebut dilakukan secara serampangan tanpa kendali dan tanpa memperhatikan AMDAL serta tidak menerapkan manajemen resiko bencana, maka akan menimbulkan dampak berupa bencana yang cukup besar pula, yaitu banjir bandang, tanah longsor, serta timbulnya daerah rawan kekeringan. Oleh karena daerah resapan untuk sumber air di daerah perbukitan berpasir akan berkurang drastis, sehingga sumur-sumur warga yang biasanya masih ada pada saat musim kemarau tiba akan menjadi berkurang sekali (kering).

Secara Hidrografis wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa sungai yang cukup besar yaitu sungai Laweyan, Rejoso, Gembong, Welang, Petung,

Masangan, Kedunglarangan, serta terbagi dalam 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara di Selat Madura, yaitu :

- a) DAS Laweyan : bermuara di Desa Penunggul Kecamatan Nguling
- b) DAS Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- c) DAS Welang : bermuara di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton
- d) DAS Petung : bermuara Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso
- e) DAS Kedunglarang: bermuara di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil

Ditinjau dari kondisi Hidrogeologi, Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup berupa air permukaan dan air tanah. Selain potensi sungai terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu Grati dengan volume efektif sebesar 5.013 m³ dan volume maksimum 5.217 m³ mampu mengeluarkan debit maksimum 463 liter/detik. Selain itu terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit air sampai 5.650 liter / detik. Di Kecamatan Winongan terdapat dua sumber air yaitu sumber air Umbulan dan Banyu Biru. Sumber air Umbulan merupakan sumber air terbesar dengan debit maksimum 5.650 liter/ detik, sedangkan sumber air Banyu Biru dengan debit maksimum 225 liter/ detik. Di lereng perbukitan juga terdapat sumur bor tertekan (artesis) dan non tertekan dengan debit sekitar 5 – 10 liter/ detik. Berikut adalah gambar peta Kabupaten Pasuruan secara luas:



Gambar 5. Peta Kabupaten Pasuruan
 Sumber: Internet

b. Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

Visi :

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat”

Misi :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, transparan dan responsif.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan murah.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- 5) Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

a. Arti Lambang Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan PERDA No. II/1988 Pasal 3 tentang bentuk lambang daerah, maka lambang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Logo Kabupaten Pasuruan



Sumber : www.kabpas.go.id

- 1) **Perisai** dengan warna hijau tua melambangkan sifat-sifat ketahanan dan ketabahan dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian.
- 2) **Bingkai** warna hitam melambangkan garis-garis kebijaksanaan.
- 3) **Pita** bertuliskan “KABUPATEN PASURUAN”, menunjukkan satu daerah yang dilukiskan dalam lambang daerah.
- 4) **Bintang** yang terletak di tengah bagian atas, berwarna kuning emas, melambangkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang harus dijunjung tinggi penuh keagungan, sedangkan pancaran sinarnya yang berjumlah 5 buah mencerminkan PANCASILA.
- 5) **Kubah** berwarna biru muda, melambangkan tempat ibadah agama, secara khusus merupakan kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan dengan penuh ketaqwaan.

- 6) ***Keris*** berwarna hitam dan kuning dengan garis tepi berwarna putih melambangkan sikap kepahlawanan.
- 7) ***Tebu dan Kapuk Randu*** melambangkan salah satu gambar penghasilan serta merupakan penunjang perekonomian yang menonjol bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- 8) ***Gunung, Daratan dan Laut*** masing-masing berwarna hijau tua, kuning tua, dan biru tua, melambangkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pasuruan secara khusus sangat strategis dan terletak di antara ketiganya yang masing-masing mengandung potensi perekonomian yang dapat dikembangkan dan bersifat dinamis.
- 9) ***Pita Putih*** bertuliskan “Guna Karya Sarana Bhakti” merupakan motto pembangunan yang berarti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.
(sumber: internet).

c. Sejarah Singkat Kabupaten Pasuruan

Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari peradaban Kerajaan Kalingga atau Ho Ling yang diperintah oleh seorang Raja bernama Sima. Pada tahun 742-755 Masehi, Ibu Kota Kerajaan Kalingga dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kiyen yaitu daerah Po-Lu-Kia-Sien yang ditafsirkan Pulokerto. Pulokerto adalah salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir muncullah Kerajaan Mataram Kuno dibawah kekuasaan Dinasti Sanjaya Tahun 856 Masehi dipimpin oleh Raja

Rakai Pikatan, diantara keturunan Raj Dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah adalah Raja Balitung. Kemudian pada Tahun 929 Masehi seorang Raja dai keluarga lain memerintah yaitu Mpu Sendok yang telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan ibu kota kerajaan Tawlang identik dengan nama Desa Tembelang di daerah Jombang. Selama memerintah Mpu Sendok telah mengeluarkan lebih dari dua puluh prasasti diantaranya Prasasti yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol yang menyebutkan Mpu Sendok memerintahkan agar rakyat Cungrang yang termasuk wilayah bawang, dibawah langsung Wahuta Tungkal untuk menjadi Sima (tanah perdikan). Substansi dalam prasasti ini dikonfersikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan Hari Jum'at Pahing, tanggal 18 September 929 Masehi.

Dalam era jaman Majapahit dari abad XII sampai abad XIV Masehi nama Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pasoeroean dari segi kebahasaan dapat diurai menjadi pa-soeroe-an artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan daun suruh. Sesudah kerajaan Majapahit berlangsung surut berdirilah kerajaan Islam diantaranya Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Pada era Pasoeroean dalam kekuasaan Kerajaan Giri sekitar abad XIV sampai XVI salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah lisan bahwa daerah inilah awal

Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka langgar sekaligus tempat ngaji yang kemudian dinamakan Sidogiri.

Pada masa Kerajaan Demak abad ke XV, Pasoeroean memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Adipati Pasoeroean berhasil memperluas kekuasaannya sampai Kediri. Pasoeroean dibawah Kerajaan Pajang tidak lama karena pada tahun 1616 ketika Sultan Agung bertahta Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasoeroean. Perkembangan selanjutnya pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan diangkatlah Kyai Darmoyudo menjadi wedana Bupati Pasuruan. Wilayah Pasoeroean dibawah kekuasaan Amangkurat I banyak pergolakan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Mataram bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasuruan upaya itu sangat kuat, sehingga Mataram dibantu Kompeni Belanda berupaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram. Perkembangan selanjutnya pada masa Kolonial Belanda berdasarkan Staatblad 1900 No 334 tanggal 1 Januari 1901 dibentuklah Kabupaten Pasuruan yang wilayahnya berbatasan dengan Madura, Laut Hindia, sebelah barat Residen Kediri dan Surabaya.

Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh lima kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, yaitu:

- 1) Adanya periode sejarah tertua
- 2) Bukti tertulis dan peninggalan tertua
- 3) Pemukiman yang tertua

- 4) Struktur pemerintahan tertua dan bersifat Indonesia sentris
- 5) Menunjukkan kebanggaan pada peradapan lokal.

Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasuruan berdasarkan Prasasti Cungrang atau SUKCI yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol maka Kabupaten Pasuroean lahir pada hari Jum'at Pahing tanggal 18 September 929 Masehi. Atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka di undangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahun diwilayah Kabupaten Pasuruan. (sumber: internet).

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan adalah salah satu instansi yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertugas untuk melayani tentang masalah ketenagakerjaan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Pasuruan terbentuk dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000 yang merupakan penggabungan dari instansi vertikal (kantor departemen tenaga kerja) Kabupaten Pasuruan yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) pemerintah Provinsi Jawa Timur dan departemen transmigrasi.

Selama berjalannya waktu dan adanya perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan di tindak lanjuti dengan Peraturan daerah

Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan saat ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pisah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan yang telah di bahas dalam Peraturan daerah No. 50 Tahun 2016.

a. Kebijakan Mutu Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pasuruan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan adalah salah satu dinas yang dalam hal kerjanya untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan terhadap informasi lowongan pekerjaan, pembuatan surat angkatan kerja dan lain-lain. Maka dari itu kebijakan mutu dalam memberikan pelayanan harus di perhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pasuruan yaitu:

“Pimpinan dan staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota/ Kabupaten bertekad kuat untuk selalu:

- a. Memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan pelanggan;
- c. Melakukan perbaikan berkesinambungan dalam pelayanan, pemenuhan sumber daya, dan sistem manajemen mutu yang diterapkan untuk mencapai kepuasan

pelanggan dan pihak lain yang terkait”. (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016)

b. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Tenaga Kerja Kabupten Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan maka Dinas Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi adalah unit pelaksana pemerintah daerah dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenaga kerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;

- e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi

Kabupaten Pasuruan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan penyusunan program keuangan. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang pelatihan Kerja dan Produktivitas, membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja;

2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja, terdiri dari:
1. Seksi Penempatan dan Bursa Kerja;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Seksi Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Latihan Kerja Daerah (UPTD-LKD) membawahi Sub Bagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional. (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016)

c. Gambaran Umum Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

Dinas Tenaga Kerja dan bidang transmigrasi dalam tugas dan fungsinya di atas masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsi berbeda antara lain:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan pengimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b) menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c) menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e) menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - f) menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yang terdiri dari:
- a) menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c) menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
 - d) menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - e) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - b) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - d) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang pelatihan Kerja dan Produktivitas.
5. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a) menyiapkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
 - b) menyiapkan bahan rencana pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang latihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c) menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d) menyiapkan bahan materi pelatihan kerja;
 - e) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
 - f) menyiapkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - g) menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - h) menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - i) menyiapkan bahan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja.
6. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan analisis kebutuhan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja;
- b) menyiapkan bahan rencana kegiatan fasilitasi sertifikasi untuk peserta pelatihan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
- c) menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan fasilitasi asesmen terkait calon peserta, assessor, tempat unjuk kerja, sarana dan prasarana, materi uji, pembiayaan dan standar kompetensi kerja nasional yang digunakan bersama Lembaga Sertifikasi Profesi untuk penerbitan sertifikat kompetensi;
- d) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan asesmen;
- e) menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yangt diberikan oleh kepala bidang.

7. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b) menyiapkan bahan pelaksanaan program pelatihan;
- c) menyiapkan sarana dan prasarana;
- d) menyiapkan instruktur dan tenaga kepelatihan;
- e) menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- f) menyiapkan bahan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- g) menyiapkan bahan promosi peningkatan produktivitas;
- h) menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;

- i) menyiapkan bahan pemantauan tingkat produktivitas; dan
 - j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
8. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
9. Seksi Penempatan Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
- a) menyiapkan bahan perencanaan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - b) menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
 - c) menyiapkan bahan rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
 - d) menyiapkan bahan perencanaan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - e) menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - f) menyiapkan bahan penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - g) menyiapkan bahan penyusunan kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing;

- h) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing; dan
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

10. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perencanaan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b) menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- d) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan non klasikal kepada masyarakat;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembentukan kewirausahaan baru melalui kegiatan teknologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri;
- f) menyiapkan bahan pembentukan program tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja sukarela; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

11. Seksi perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunya tugas adalah sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan perencanaan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebar luasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- b) menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- c) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- d) menyiapkan bahan penyiapan sumberdaya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- e) menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- f) menyiapkan bahan perencanaan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- g) menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Inonesia pra dan purna penempatan;
- h) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
- i) menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- j) menyiapkan sarana dan prasarana pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;

- k) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
 - l) menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
 - m) menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan bahan penyusunan kebutuhan purna;
 - n) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan bahan penyusunan kebutuhan purna;
 - o) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketrasmigrasian; dan
 - p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
12. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial, pengembangan kelembagaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
13. Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan penyusunan penyiapan sumberdaya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;

- b) menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan Lembaga Kerja Bipartit;
- c) menyiapkan bahan penyusunan konsep pendaftaran perjanjian kerjasama di Kabupaten/ Kota; dan
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

14. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyiapkan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jamnian sosial tenaga kerja;
- b) menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c) menyiapkan bahan penetapan upah minimum Kabupaten/ Kota dan Sektoral;
- d) menyipakan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan tenaga kerja; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

15. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas antara lain:

- a) menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- b) menyiapkan sara dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Latihan Kerja Daerah (UPTD-LKD) merupakan unsure pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan institusional (klasikal) berbasis kompetensi pada UPTD-LKD. Unit Pelaksana Teknis Dinas Latihan Kerja Daerah (UPTD-LKD) mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan UPTD-LKD;
- b) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan institusional ketrampilan berbasis kompetensi;
- c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- d) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan operasional UPTD-LKD;
- e) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan tenaga terampil;

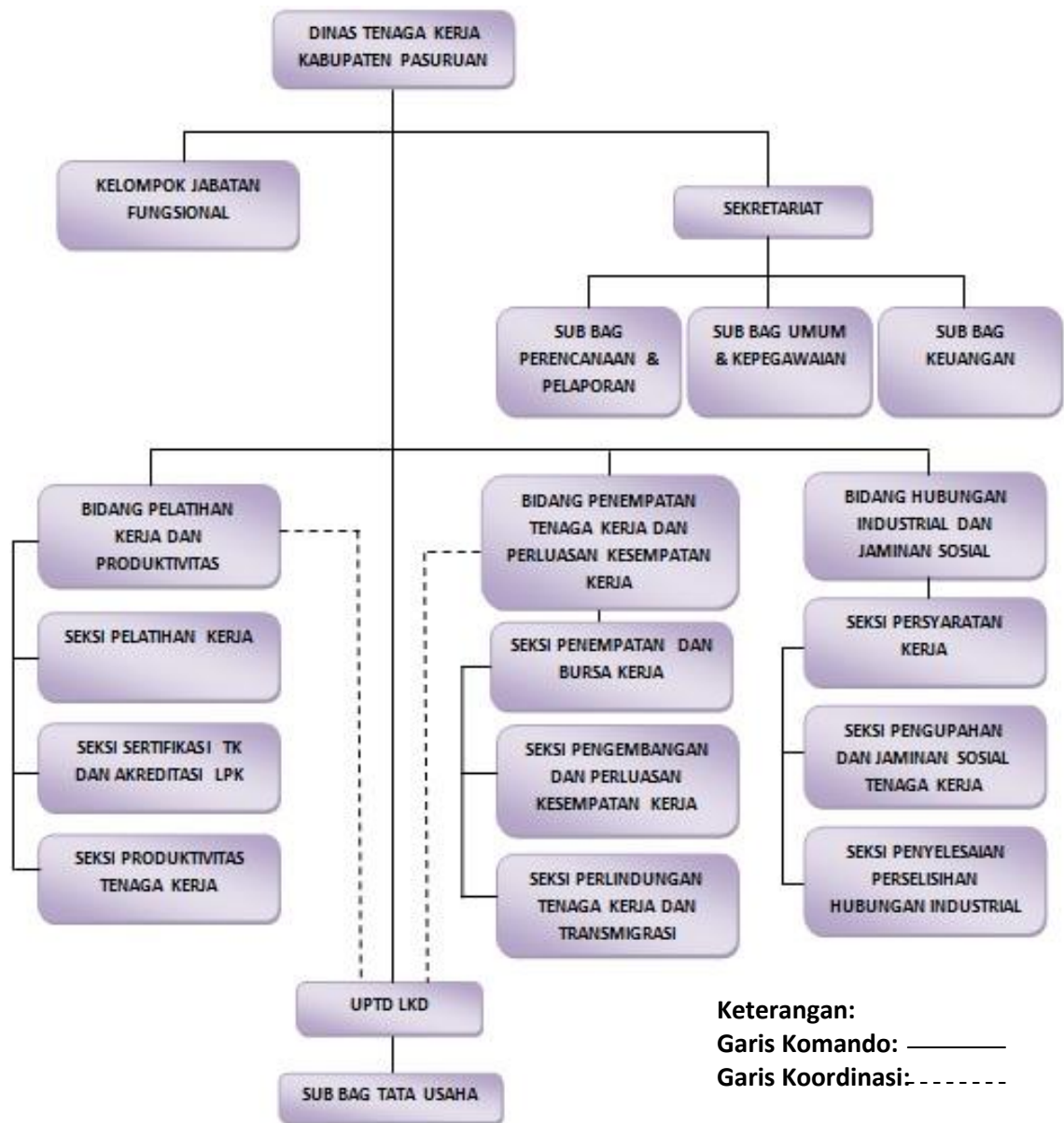
- f) menyiapkan bahan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi tenaga kerja; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas antara lain:

- a) menyiapkan bahan ketatausahaan UPTD;
- b) menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan administrasi perlengkapan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan program kegiatan UPTD;
- e) menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada UPTD.

18. Kelompok Jabatan Fungsional dalam peraturan bupati pasuruan nomor 50 tahun 2016 pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut adalah gambar Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi Kabupaten Pasuruan:



Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

Sumber: Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016

d. Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

Dinas Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, imtergritas dalam lingkungan dalam bidangnya maupun dalam organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam instansi lain di luar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 ayat (1), setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan segera wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pimpinan dalam organisasi harus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya dalam menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Tata kerja dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016)

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan

Program Informasi Pasar Kerja Online atau yang biasa disebut (IPKOL) adalah program yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Program Informasi Pasar Kerja di buat bertujuan untuk memudahkan publik untuk memperoleh info lowongan kerja hanya dengan menggunakan internet. Selain itu bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Program Informasi Pasar Kerja Online dibuat dan dijalankan oleh seluruh Indonesia, salah satunya adalah pada Kabupaten Pasuruan. Maka dari hal tersebut peneliti ingin meneliti tentang implementasi Program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan yang di tinjau dari beberapa aspek yaitu:

a) Penyedia layanan dalam pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online Kabupaten Pasuruan yang melatar belakangi berdirinya program Informasi Pasar Kerja Online.

Program Informasi Pasar Kerja Online adalah suatu program yang di buat secara nasional dari kementerian pusat dan di khususkan untuk mengelolah data para pencari kerja, dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan secara nasional. Manfaat dari program Informasi Pasar Kerja Online tersebut dapat lebih meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif. Seperti

yang dijelaskan oleh Bapak Agus Hernawan selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

“Pelayanan publik seperti ini kita di tuntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan efektif agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang mereka inginkan, dengan cara mendekati konsumen. Program Informasi Pasar Kerja Online ini mempermudah para pencari kerja dalam membuat AK-1 atau kartu angkatan kerja dimana dalam kartu tersebut data diri dari masing-masing para pencari kerja akan di data secara nasional maupun dalam lingkup daerah. Selain itu dalam program Informasi Pasar Kerja Online tersebut terdapat informasi lowongan pekerjaan dalam lingkup nasional ataupun menurut daerah masing-masing. Jadi mempermudah dalam hal pelayanan publik itu sendiri, kita sebagai aparatur Negara di tuntut untuk memberikan pelayanan prima dan efektif. Untuk warga yang jauh wilayahnya tidak perlu datang langsung untuk mendaftar dan antri dalam memperoleh layanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masing-masing hanya datang ke Dinas untuk minta legalisir atau memberikan kode login registasi dengan menunjukkan ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir. Dengan melihat pelayanan sebelum diterapkannya program Informasi Pasar Kerja Online ini banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan selain karena wilayah yang jauh dan pelayanan manual akan menyita banyak waktu dan belum tentu efektif dalam penerapannya”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Sekretariat, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 09.00).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran saat ini memang sangat dibutuhkan. Sebagai Aparatur Negara dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi pelayanan kearah yang lebih baik dengan memberikan pelayanan yaitu dengan cara mendekati konsumen. Dengan adanya program Informasi Pasar Kerja Online dirasa sangat membantu dalam melakukan pelayanan dalam bidang tenaga kerja. Dengan menerapkan program Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) mempermudah bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Latar belakang terciptanya program Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Memberikan informasi seputar info lowongan kerja sehingga masyarakat bisa mengakses info lowongan kerja dengan mudah dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Program IPKOL tersebut tidak begitu saja muncul dalam hal ini ada yang mempengaruhi munculnya program inovasi tersebut, seperti yang dijelaskan Bapak Agus Hernawan selaku Sekretaris dalam wawancara sebagai berikut:

“Program Informasi Pasar Kerja Online atau yang biasanya di sebut dengan IPKOL adalah program yang di kembangkan melalui Kementerian Republik Indonesia dengan cara memberikan pedoman tentang informasi pasar kerja dalam peraturan menteri nomor KEP.268/PPTK/XII/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Program IPKOL ini sudah berjalan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 ini. Karena dalam era sekarang ini instansi pemerintah diwajibkan membenahi pelayanannya kearah yang lebih baik”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Sekretariat, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 09.20).

Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa program Informasi Pasar Kerja Online berpedoman dari peraturan menteri dalam negeri yang membahas tentang informasi pasar kerja, yang mana di khususkan untuk para pencari kerja agar menjadi lebih mudah dalam menerima informasi tentang lowongan pekerjaan. Diharapkan pelayanan publik dapat memberikan kesan baik pada penerima layanan. Program Informasi Pasar Kerja Online sendiri telah berjalan mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017 ini dan dapat dilihat perbedaan dari dijalankannya program ini dengan sebelum dijalankannya program Informasi

Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan jumlah pengangguran yang bisa di lihat mulai mengalami penurunan. Berikut adalah tabel perbandingan antara sebelum menggunakan IPKOL dengan setelah menggunakan program IPKOL:

Tabel 3. Jumlah pengangguran secara manual di Kabupaten di Pasuruan tahun 2008-2011

Tahun	Jumlah Pengangguran	Angkatan Kerja	Presentase %
2008	42.096	747.087	4,50
2009	49.812	776.781	6,41
2010	59.802	795.558	7,51
2011	36.828	882.124	4,18

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2017

Tabel 4. Jumlah pengangguran menggunakan Informasi Pasar Kerja Online tahun 2012-2016 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jumlah Pengangguran	Angkatan Kerja	Presentase %
2012	39.335	890.652	4,41
2013	38.952	905.668	4,30
2014	37.123	912.079	4,07
2015	25.809	934.495	2,77
2016	23.825	870.347	2,73

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2017

Keterangan:

$$\frac{\text{Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \%$$

b) Jenis Layanan dalam Pelaksanaan Program Informasi Pasar Kerja Online

Pada layanan Informasi Pasar Kerja Online ini tidak hanya menangani tentang masalah informasi lowongan pekerjaan didalamnya ada pelayanan yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Agus Hernawan selaku Sekretaris:

“Dalam kegiatan pelayanan tentang Program Informasi Pasar Kerja Online sendiri tidak semuanya tentang informasi lowongan pekerjaan dalam program tersebut juga masih banyak jenis pelayanan yang diberikan yaitu layanan pencari kerja, layanan pengusaha dan masyarakat, layanan ketenagakerjaan yang berbentuk konsultasi peraturan tenaga kerja, analisis dan bimbingan jabatan, antar kerja lokal, layanan antar kerja daerah, layanan antar Negara, perizinan tenaga kerja asing”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Sekretariat, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 09.30).

Berikut merupakan penjelasan mengenai Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKD), dan Antar Kerja Negara (AKN), yaitu:

1. Layanan Antar Kerja Lokal (AKL) adalah mekanisme layanan antar kerja dalam lingkup penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Contoh: pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan dan ingin mencari kerja pada lingkup Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 terhitung jumlah layanan Antar Kerja Lokal dari Kabupaten Pasuruan sendiri berjumlah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Antar Kerja Lokal di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
2012	5.966
2013	4.505
2014	4.103
2015	5.655
2016	4.002

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2017

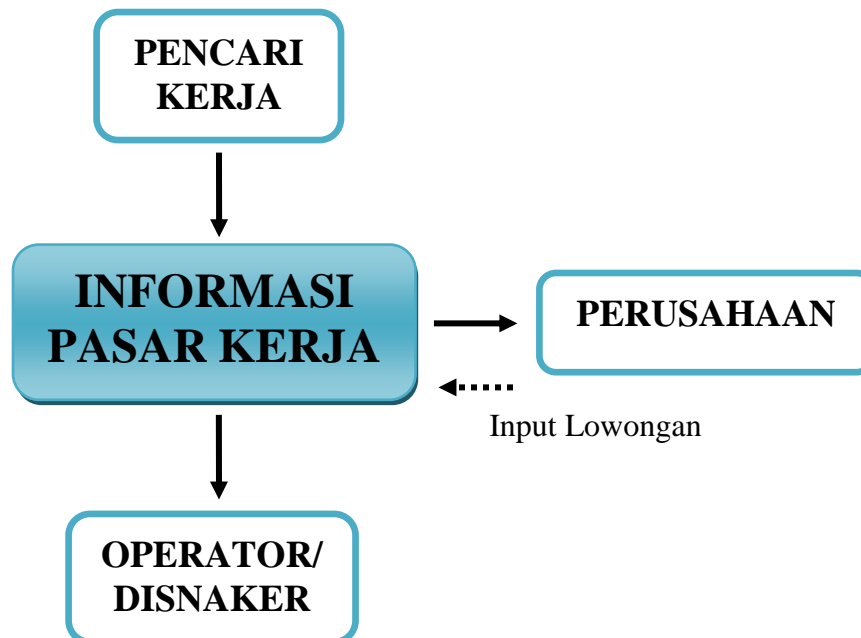
2. Layanan Antar Kerja Daerah (AKD) adalah mekanisme layanan antar kerja dalam lingkup penempatan tenaga kerja antar daerah dalam lingkup luar Kabupaten Pasuruan. Contoh: pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan dan ingin mencari kerja di luar daerah Pasuruan. Layanan Antar Kerja Daerah Kabupaten Pasuruan dalam data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2012-2016 tidak terdaftar jumlahnya.
3. Layanan Antar Kerja Negara (AKN) adalah mekanisme pelayanan antar kerja dalam lingkup penempatan tenaga kerja antar Negara. Contoh: TKI atau Tenaga Kerja dari Kabupaten Pasuruan yang bekerja di luar negeri. Dari data yang di peroleh peneliti mulai tahun 2012-2016 jumlah Layanan Antar Negara di Kabupaten Pasuruan berjumlah:

Tabel 6. Jumlah Layanan Antar Negara di Kabupaten Pasuruan tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
2012	55
2013	76
2014	50
2015	40
2016	49

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2017

Informasi Pasar Kerja Online dalam pelaksanaan dan pelayanan adalah melalui <http://infokerja.kemnaker.go.id>. dengan cara yang pertama adalah:



Gambar 8. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Dalam penjelasan diatas pencari kerja adalah orang yang membutuhkan pekerjaan, datang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuat AK-1 (Kartu Pencari Kerja) dan menginput data pencari kerja ke dalam program Informasi Pasar Kerja Online tersebut. Setelah itu operator atau Disnaker sebagai pemberi layanan dalam program Informasi Pasar Kerja Online menginput data pencari kerja dan bertugas memfasilitasi jalannya program Informasi Pasar Kerja Online tersebut pada pencari kerja dan bertugas memverifikasi penginputan data melalui program Informasi Pasar Kerja Online. Proses selanjutnya pembuatan AK-2 (Data Pencari Kerja) untuk di input dalam program Informasi Pasar Kerja Online, setelah itu memberikan informasi seputar tentang info lowongan pekerjaan yang berada pada lingkup Kabupaten Pasuruan khususnya dalam proses ini di sebut AK-3 (Info Lowongan). Program Informasi Pasar Kerja Online tidak akan berjalan tanpa adanya peran perusahaan yang bertugas membuka lowongan pekerjaan dan membutuhkan Tenaga Kerja untuk dipekerjaan dalam perusahaannya dengan adanya hal tersebut masing-masing perusahaan wajib melakukan Wajib Lapor Lowongan (WLL) dasarnya adalah Kepres No. 4 Tahun 1980. Proses selanjutnya setelah data para pencari kerja masuk sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, pihak Disnaker bertugas memberikan Kartu Panggilan (AK-4) bagi pencari kerja dan langsung dibuatkan Surat Pengantar (AK-5) untuk menuju keperusahaan terkait.

Dari pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja atau Informasi Pasar Kerja Online dirasa cukup efektif bagi para pemberi layanan dan penerima layanan karena lebih menghemat waktu dalam pelayanan tentang informasi pasar kerja, seperti yang dipaparkan oleh bapak Agus Hernawan selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut:

“Pada dasarnya, tata cara yang terdapat pada program Informasi Pasar Kerja Online itu memang jauh lebih efektif dalam pelayanannya, terutama untuk warga yang jangka rumahnya jauh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperoleh pelayanan yang di inginkan tentang informasi pasar kerja. Tentu dalam program tersebut juga perlu adanya dukungan dari jaringan internet yang memadai untuk mengakses program Informasi Pasar Kerja Online tersebut”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Sekretariat, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.00).

Pencari kerja yang terdaftar dalam program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan setelah di jalankannya program IPKOL dari tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sebagai berjumlah sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dalam program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
2012	6.728
2013	6.582
2014	5.435
2015	8.492
2016	8.573

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan 2017

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa program Informasi Pasar Kerja Online sangat membantu para pencari kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan dalam proses pelayanannya dirasa cukup efektif. Dengan demikian program ini dapat mempermudah para pencari kerja untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang di inginkan.

c) Pengendalian dan Pelaporan Tentang Program Informasi Pasar Kerja Online

Pengendalian dan pelaporan tentang program Informasi Pasar Kerja Online ini dilakukan untuk menjamin keberlangsung dan efektivitas kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Djoko Susilo selaku Kepala Bidang Pengantar tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

“Pengendalian dan pelaporan tentang program Informasi Pasar Kerja Online di lakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI karena program Informasi Pasar Kerja Online dibuat oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan langsung dipantau oleh kementerian. Sedangkan dalam pelaksanaannya kami selaku pihak pelaksana dari jalannya program Informasi Pasar Kerja Online ikut serta dalam proses pengawasan jalannya program ini dari kondisi riil yang ada di lapangan pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Dalam proses pengendalian terhadap program Informasi Pasar Kerja Online ini dilakukan secara berkala yaitu setiap satu bulan sekali dilakukan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan dan implementasi terhadap program tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Informasi Pasar Kerja Online dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang ada.”

Berdasarkan penjelasan dari bapak Djoko Susilo diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian terhadap program Informasi Pasar Kerja Online pada Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI dan juga oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sendiri selaku pelaksana dari program tersebut. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasuruan melakukan pengendalian terhadap implementasi Program Informasi Pasar Kerja Online hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari program IPKOL dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan, proses pengawasan dalam lingkup internal dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dananya bersumber dari APBN. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan fungsional, pengawasan tersebut dilakukan oleh inspektorat jenderal yang berada langsung di bawah Menteri Ketenagakerjaan RI.
- b. Pengawasan dan pengendalian oleh atasan lagsung (pengawasan melekat). Pengawasan tersebut disesuaikan dengan hirarki organisasi.
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan

yang berakibat merugikan keuangan Negara. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online memerlukan serangkaian pendukung antara lain pihak-pihak yang membantu jalannya program Informasi Pasar Kerja Online antara lain, BLK, BKK, dan forum komunikasi antar sekolah kejuruan. Selain itu faktor pendukung lainnya seperti jaraningan internet yang memadai untuk memberikan layanan tentang Informasi Pasar Kerja Online tersebut yang memang membutuhkan jaringan internet. Dengan berjalannya program Informasi Pasar Kerja Online tersebut juga memerlukan pengawasan dari pihak lain agar program tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Selain itu program Informasi Pasar Kerja Online ini dapat membantu mempermudah pelayanan maupun pihak yang mendapatkan layanan dengan lebih mudah untuk memperoleh pelayanan yang efisien dan efektif dalam memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan.

d) Sasaran dan manfaat program Informasi Pasar Kerja Online

Program Informasi Pasar Kerja Online yang dijalankan di Kabupaten Pasuruan tentunya ada dikarenakan untuk mengurangi jumlah pengangguran pada Kabupaten Pasuruan. Sasaran dari program Informasi Pasar Kerja Online ini adalah para pencari kerja atau masyarakat itu sendiri. Selain itu manfaat dari program Informasi Pasar Kerja Online adalah memberikan pelayanan terbaik

mengenai informasi pasak kerja dan dapat membantu publik untuk mendapatkan informasi seputar lowongan pekerjaan dengan mudah hanya dengan mengakses infokerja.kemnaker.go.id/index dan langsung dapat mencari info lowongan kerja menurut daerah masing-masing. Hal ini berdasarkan hasil wawancara juga terhadap Bapak Djoko Sulistyono selaku Kepala Bidang Penta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

“Program Informasi Pasar Kerja Online yang telah diterapkan pada Kabupaten Pasuruan di khususkan untuk para pencari kerja dan dan pihak pemberi kerja agar lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang mempunyai potensi lebih dibidang keahliannya. Selain itu manfaat dari program Informasi Pasar Kerja Online ini bagi masyarakat khususnya yang letak rumahnya jauh dari Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan pelayanan di bidang kartu angkatan kerja atau AK-1 adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang menyangkut informasi tentang ketenaga kerjaan”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Kepala Bidang Penta, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 11.00).

Selain itu pernyataan diatas dibarengi dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang selaku target dari program Informasi Pasar Kerja Online mengenai manfaat dari jalannya program tersebut. Pendapat dari informan pertama yaitu Sholiha selaku masyarakat yang menikmati manfaat dari program Informasi Pasar Kerja Online adalah sebagai berikut:

“Informasi Pasar Kerja Online dari mulai proses pelayanan pembuatan kartu angkatan kerja atau AK-1 tapi biasanya saya lebih taunya kartu kuning yaitu kartu yang menjadi salah satu persyaratan untuk mencari pekerjaan. Selain itu petugas pengantar kerja yang memberikan pelayanan seputar informasi pasar kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan sangat membantu dalam memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan khususnya yang berada di sekitar pasuruan. Manfaat yang saya rasakan dari adanya program ini adalah lebih cepat mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan yang saya inginkan langsung bisa diakses sesuai keahlian dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Selain itu adanya fasilitas internet gratis untuk mengakses

program Informasi Pasar Kerja Online sangat mendukung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik”. (Wawancara dilaksanakan di ruang pelayanan Penta, Tanggal 21 Februari 2017, pukul 09.10).

Selanjutnya adalah hasil wawancara dari informan kedua yang bernama Andini Lestari selaku masyarakat yang merasakan manfaat dari program

Informasi Pasar Kerja Online:

“Dengan adanya program Informasi Pasar Kerja Online menurut saya puas dengan program ini karena saya sebagai masyarakat diuntungkan dari program ini rumah saya jauh ada di Purwosari dan dulu waktu masih menggunakan sistem manual dengan melihat info lowongan pekerjaan harus datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang letaknya sangat jauh dari rumah saya dengan adanya program Informasi Pasar Kerja Online ini dengan mudah saya dirumah bisa mengakses lewat internet dan memasukan data diri dan saya hanya datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan nomor regristrasi dari program tersebut dan petugas pengantar kerja hanya konfirmasi nomor regristrasi yang didapat dan di pihak dinas mencetak kartu AK-1 untuk persyaratan mendaftar kerja. Saran dari program Informasi Pasar Kerja Online ini adalah lebih di tingkatkan dalam pelayanan terutama tentang informasi pasar kerja khususnya info lowongan yang ada di Kabupaten Pasuruan sendiri”. (Wawancara dilaksanakan di ruang pelayanan Penta, Tanggal 21 Februari 2017, pukul 09.25).

Selain itu menurut pendapat informan ketiga yang bernama Muhammad Agus Arizal menjelaskan manfaat tentang program Informasi Pasar Kerja Online yang dirasakan adalah sebagai berikut:

“Adanya program Pasar Kerja Online itu memang membantu masyarakat dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan akan tetapi dalam penerapannya masih dirasa kurang karena info tentang lowongan kerja kadang sudah tidak berlaku atau sudah ditutup akan tetapi pada program tersebut masih dicantumkan dengan hal tersebut saya sebagai pencari kerja merasa kurang dalam hal tersebut. Untuk pelayanan yang di berikan oleh petugas pengantar kerja saya rasa sudah cukup bagus dan ramah terutama konsultasi mengenai solusi seputar bursa kerja dan memberikan arahan sesuai dengan minat dan keahlian pencari kerja dalam menentukan perusahaan yang akan dipilih”. (Wawancara dilaksanakan di ruang pelayanan Penta, Tanggal 21 Februari 2017, pukul 11.25).

Sedangkan menurut informan keempat dari pendapat Misbachul Munir selaku masyarakat yang merasakan manfaat dari Program Informasi Pasar Kerja Online adalah sebagai berikut:

“Program Informasi Pasar Kerja Online saya malah baru tau ini, kalau ada program untuk menginformasikan tentang pasar kerja atau bursa kerja. Menurut saya program ini masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program Informasi Pasar Kerja Online ini. Karena pihak Dinas Tenaga Kerja sendiri belum sosialisasi tentang program secara luas. Jadi kami sebagai masyarakat belum tau betul program ini. Selain itu pelayanan tentang pembuatan surat AK-1 sebagai persyaratan kerja masih harus datang ke Dinas Tenaga Kerja dan terkait tentang pelayanan yang di berikan masih kurang memuaskan mulai dari petugas pengantar kerja dan fasilitas yang di berikan. Untuk kedepannya berharap program Informasi Pasar Kerja Online yang di buat oleh Kementerian Tenaga Kerja ini dapat menciptakan inovasi baru yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan seputar pasar kerja yang ada”. (Wawancara dilaksanakan di ruang pelayanan Penta, Tanggal 21 Februari 2017, pukul 09.30).

Hasil dari wawancara dengan ke empat informan tersebut dapat di simpulkan bahwa implementasi dari program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dirasa sudah cukup baik dalam memberikan informasai seputar ketenagakerja terutama informasi tentang pasar kerja. Dari program tersebut masyarakat sebagai pencari kerja dimudahkan untuk memperoleh informasi seputar lowongan pekerjaan hanya dengan mengakses internet dan dapat dengan mudah mencari lokasi lowongan kerja menurut daerah masing-masing. Program Informasi Pasar Kerja Online memang di khususkan untuk para pencari kerja agar dengan mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Akan tetapi dalam penerapan program Informasi Pasar Kerja Online tersebut masih dirasa ada yang

kurang, kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan program tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi secara luas kepada masyarakat. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan yang dibuat harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dan yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan di laksanakan. Karena setiap kebijakan yang dibuat harus memiliki hasil dari implementasi program tersebut, apabila dalam program Informasi Pasar Kerja Online tidak ada manfaatnya maka dianggap suatu kebijakan program tersebut tidak berhasil implementasinya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Informasi Pasar Kerja Online yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

Penerapan suatu program yang di jalankan oleh pemerintah tidak semuanya dapat berjalan dengan baik ataupun efektif dan efisien. Tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan penerapan suatu program Informasi Pasar Kerja Online yang di terapkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam jalannya program tersebut yang dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Hernawan selaku sekretaris di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

“Dalam penerapan program Informasi Pasar Kerja Online ini harus ada faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam jalannya program Informasi Pasar Kerja Online ini. Ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya program Informasi Pasar Kerja Online ini antara lain: Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya komputer dan jaringan internet, regulasi, anggaran, jumlah perusahaan yang tersedia di Kabupaten Pasuruan, forum komunikasi bursa kerja khusus, forum komunikasi jejaring pemagangan, komitmen pempa untuk meningkatkan layanan antar kerja, dan standarisasi layanan antar kerja seperti halnya ISO 9001: 2015. Dengan adanya faktor pendukung seperti yang saya sebutkan tadi diharapkan program Informasi Pasar Kerja Online ini dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang mempermudah pemberi layanan dan yang membutuhkan layanan publik yang lebih baik lagi”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Sekretariat, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.15).

Seperti halnya yang di jelaskan oleh Bapak Agus Hernawan di atas Berikut adalah faktor pendukung dalam jalannya program Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL), antara lain:

a) Faktor Pendukung Jalannya Program Informasi Pasar Kerja Online

1) Faktor internal

1. Sumber Daya Manusia yang Tersedia

Dalam jalannya program Informasi Pasar Kerja Online Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu faktor pendukung terpenting yang mempengaruhi jalannya program Informasi Pasar Kerja Online sendiri. SDM yang memadai dapat berpengaruh untuk jalannya program ini, yang mana SDM itu sendiri adalah anggota dinas dan masyarakat yang menerima pelayanan dari program Informasi Pasar Kerja Online. Kualitas dari SDM sendiri sangat berpengaruh dalam jalannya program Informasi Pasar Kerja Online karena pada dasarnya,

untuk menjadi panitia yang menangani program Informasi Pasar Kerja Online ini harus ada latar belakang teknologi informasi yang jelas dan harus bisa memahami betul-betul tentang program Informasi Pasar Kerja Online itu sendiri. Sumber daya manusia berpengaruh dalam berjalannya program Informasi Pasar Kerja Online yang berjalan di Kabupaten pasuruan seperti halnya dalam memberikan pelayanan tentang pembuatan kartu pengantar kerja, selain itu dalam berjalannya program ini masyarakat Kabupaten Pasuruan harus ikut serta dalam mendukung jalannya program Informasi Pasar Kerja Online. Dengan cara ikut berpartisipasi dalam mengakses data diri pada website yang tersedia. Selain itu masyarakat lebih terbuka dalam menerima perubahan menuju kearah yang lebih baik.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana maksudnya disini adalah pendukung dari jalannya program Informasi Pasar Kerja Online. Sarana dan prasana pendukung maksudnya adalah komputer dan jaringan internet atau wifi sebagai penunjang jalannya program Informasi Pasar Kerja Online tersebut. Karena program Informasi Pasar Kerja Online adalah program yang menggunakan internet dan otomatis juga harus ada komputer sebagai penunjang dari jalannya program tersebut. Maka dari itu jaringan internet atau wifi perlu di perhatikan besarnya Mega byte per second (Mbps) atau Kilo byte per second (Kbps). Maka dari itu dapat di lihat kecepatan untuk mengakses

program Informasi Pasar Kerja Online tersebut dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.

3. Regulasi

Regulasi adalah pedoman untuk jalannya program Informasi Pasar Kerja Online seperti halnya dengan regulasi tentang program Informasi Pasar Kerja ini adalah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang membahas tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Informasi Pasar Kerja Nomor KEP.268/PPTK/XII/2012. Dengan adanya regulasi tersebut dapat memberikan pedoman tentang petunjuk teknis pengelolaan program Informasi Pasar Kerja Online.

2) Faktor Eksternal

1. Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program yang akan di kerjakan. Anggaran atau dana Informasi Pasar Kerja Online di peroleh dari pemerintah pusat sebesar Rp. 750.000,-/bulan. Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi program Informasi Pasar Kerja Online seperti halnya dengan memasang jaringan internet seperti wifi, komputer dan lain-lain.

2. Jumlah Perusahaan Kabupaten Pasuruan

Jumlah perusahaan di Kabupaten Pasuruan juga berpengaruh dalam faktor pendukung dalam jalannya program Informasi Pasar Kerja Online ini

dimana banyaknya jumlah perusahaan berpengaruh dalam merekrut tenaga kerja yang khususnya berada di Kabupaten Pasuruan. Dengan cara lebih mengutamakan memilih tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan sehingga tenaga kerja dapat terserap semaksimal mungkin dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Pasuruan.

3. Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus

Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus adalah suatu forum yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan informasi-informasi mengenai ketengakerjaan melalui selokah menengah kejuruan yang tujuannya adalah memberikan informasi mengenai dunia kerja dan pelatihan kerja.

4. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Forum komunikasi jejaring pemagangan adalah sebagai salah satu komponen penting penyelenggaraan pemagangan, harus dibentuk secara proposional yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan asosiasi profesi sehingga mampu melakukan identifikasi melaksanakan program pemagangan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan. Disamping itu mampu melakukan identifikasi dan evaluasi terkait tentang penyelenggaraan pemagangan, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep pemagangan kedepan terutama sebagai penyeimbang dan pengawasan penyelenggaraan

pemagangan di perusahaan baik penyelenggaraan pemagangan yang dilaksanakan melalui APBN, APBD maupun Mandiri. Dengan demikian, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan mempunyai program terukur, terarah, konkret, kreatif dan efektif.

5. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan antar kerja

Maksudnya disini bagaimana pemerintah daerah ikut serta dalam meningkatkan pelayanan kerja antar daerah. Seperti halnya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bekerjasama dalam urusan antar kerja untuk sama-sama saling membantu dalam urusan masalah tenaga kerja atau pengangguran.

6. Standarisasi Layanan Antar Kerja

Standarisasi layanan antar kerja seperti halnya Standart ISO 9001 yang mengatur tentang sistem Manajemen Mutu. ISO adalah standar internasional yang diakui dunia untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan bersifat global atau mendunia. Sistem Manajemen Mutu menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktifitas rutin perusahaan. Sistem ini bersifat umum dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis organisasi dan industri. Sistem ini juga bersifat fleksibel untuk mengarahkan berbagai organisasi dan industri dalam mencapai efisiensi dan efektifitas dalam

pengelolaannya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Seperti halnya tata cara memberi pelayanan yang baik pada pelanggan. Melakukan perbaikan terus menerus memfokuskan pada kebutuhan pelanggan, tujuannya adalah untuk mencari hasil yang lebih baik dan dengan mengacu pada standarisasi ISO 9001.

b) Faktor Penghambat Jalannya Program Informasi Pasar Kerja Online

Dalam suatu program yang dibuat oleh pemerintah akan selalu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal tersebut menjadikan suatu program yang dijalankan dapat secara terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Seperti halnya program Informasi Pasar Kerja Online ini yang telah dijalankan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan ada juga faktor yang penghambat jalannya program Informasi Pasar Kerja Online (Informasi Pasar Kerja Online), seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Hernawan selaku sekretaris di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam jalannya program informasi pasar kerja ini menurut saya biasalah masalah akses jaringan. Program Informasi Pasar Kerja Online ini kan di gunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia tentunya program ini sangat susah digunakan pada jam-jam tertentu seperti halnya pada jam-jam sibuk kantor. Selain karena masalah jaringan adalah masalah tentang Sumber Daya Manusianya sendiri dalam hal teknologi informasi atau dalam pengelolaan program di bidang teknologi”. (Wawancara dilaksanakan di ruang Sekretariat, Tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.20).

Dengan pernyataan yang dibicarakan Bapak Agus Hernawan diatas faktor penghambat jalannya program Informasi Pasar Kerja Online ini ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut:

1) Masalah Jaringan

Program Informasi Pasar Kerja Online ini diawasi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Masalah jaringan maksudnya program Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) di gunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan tentunya pada jam tertentu seperti halnya jam-jam sibuk kantor untuk mengakses program ini terkendala. Dengan hal tersebut pelayanan yang di lakukan di dinas-dinas yang menangani masalah tenaga kerja di lakukan pada jam istirahat.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia juga menjadi faktor penghambat dari jalannya program Informasi Pasar Kerja Online karena tidak semua orang mempunyai latar belakang sistem elektronik atau sistem informasi manajemen yang mengakibatkan menurunnya tanggungjawab karena tidak secara jelas mengetahui penerapan sistem elektronik pada program Informasi Pasar Kerja Online. Masyarakat yang kurang terbuka dengan perubahan baru menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. Manusia

juga menjadi penghambat dalam jalannya program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi terhadap program Informasi Pasar Kerja Online yang berjalan hampir 5 tahun. Seperti pendapat dari informan Misbachul Munir selaku masyarakat Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

“Program Informasi Pasar Kerja Online yang berjalan di Kabupaten Pasuruan saya malah baru mengetahui kalau ternyata pelayanan tentang ketenagakerjaan bisa di akses melalui internet. Menurut saya pihak yang terkait masih belum maksimal dalam menjalankan program ini kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan penghambat dari jalannya program Informasi Pasar Kerja Online”. (Wawancara dilaksanakan di ruang pelayanan pengantar kerja, Tanggal 21 Februari 2017, pukul 09.30).

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ikut serta merasakan program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan faktor penghambat dari jalannya program ini adalah kurangnya sosialisasi tentang program Informasi Pasar Kerja Online dan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan masih dirasa kurang memuaskan. Karena pada info lowongan pekerjaan yang tercantum pada program Informasi Pasar Kerja Online masih dirasa masih membingungkan pengguna karena info lowongan yang sudah tidak berlaku masih tercantum pada website tersebut.

Dalam sebuah penerapan sistem elektronik pada proses apapun tentunya memiliki dampak tertentu. Dari penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat dari jalannya inovasi dalam program Informasi Pasar Kerja Online saling mempengaruhi untuk menuju kearah inovasi yang lebih

baik dan terus ditingkatkan agar lebih bisa efisien dan efektif dalam penerapan program Informasi Pasar Kerja Online. Dalam hal ini sebaiknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan lebih aktif dalam memberikan informasi tentang program Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) agar masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Pasuruan mengerti maksud dan tujuan di laksanakannya program Informasi Pasar Kerja Online untuk mengetahui tentang lowongan pekerjaan yang di butuhkan oleh masing-masing pencari kerja. Sistem informasi dan sistem aplikasi adalah suatu hal penting dalam pengambilan keputusan bagi manajemen pelayanan publik, sama halnya dengan program Informasi Pasar Kerja Online.

D. Pembahasan

Uraian yang terdapat di pembahasan ini berupaya menjelaskan temuan-temuan pokok yang berkaitan dengan Implementasi Program Informasi Pasar Kerja Online di kabupaten Pasuruan dengan menagcu pad teori-teori yang digunakan.

1. Implementasi progam Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan

a) Penyedia layanan dalam pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online Kabupaten Pasuruan yang melatar belakanginya berdirinya program Informasi Pasar Kerja Online.

Implementasi adalah suatu program yang disusun berdasarkan hasil perencanaan dengan cara menempuh langkah-langkah, serta tujuan yang

diharapkan (Djamarah, 2006:4). Program Informasi Pasar Kerja Online merupakan salah satu implementasi kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di dindonesia.

Program Informasi Pasar Kerja Online yang berjalan di Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah di kabupaten Pasuruan dan angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan menjadikan program Informasi Pasar Kerja Online merupakan solusi baru untuk menciptakan pelayanan publik yang di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun bisa di lihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	1.542.837
2013	1.556.700
2014	1.569.507
2015	1.581.787
2016	1.593.683

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2017

Pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online sendiri telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI mulai dari proses penetapan personil sampai dengan pengawasan jalannya program Informasi Pasar Kerja Online tersebut, berikut adalah gambar tentang pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online menurut buku pedoman Kementerian Ketenagakerjaan RI:



Gambar 9. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten/ Kota

Sumber: Buku Kementerian Tenaga Kerja RI Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Penjelasan dari pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja harus sesuai dengan daftar isian

pelaksanaan anggaran (DIPA). Personil yang terlibat dalam surat keputusan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat diantaranya adalah Pembina yang bertugas memberikan pembinaan tentang kegiatan Informasi Tenaga Kerja agar kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, penanggung jawab bertugas mengoordinasi kegiatan agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan biasanya penanggungjawab adalah tugas dari kepala bidang penempatan dari dinas ketenagakerjaan, sekretaris bertugas membantu penanggungjawab dalam hal teknis maupun administratif, administrator Informasi Pasar Kerja Online bertugas melakukan entri data pencari kerja, data lowongan kerja dan melakukan penempatan pada aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, penyusun laporan IPK bertugas menyusun laporan IPK bulanan dan melakukan analisis data, dan pengadministrasi kegiatan bertugas membantu dan mengelolah administrasi dan keuangan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja.

- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online dilakukan oleh administrator Informasi Pasar Kerja Online yang tugasnya adalah membantu entri data pencari kerja yang datang ke dinas, memberikan user id dan kata sandi pencari kerja yang telah di masukan di Informasi Pasar Kerja Online, mencetak kartu AK1, verifikasi perusahaan setempat yang melakukan pendaftaran langsung Informasi Pasar Kerja Online, entri data lowongan perusahaan hasil *job canvassing*, dan melakukan penempatan pencari kerja di Informasi Pasar Kerja Online.

- 3) Penyusunan laporan informasi pasar kerja laporan IPK-III yang dibuat setiap bulan disusun oleh petugas antar kerja atau pengantar kerja yang telah yang telah di tunjuk sesuai aturan yang berlaku. Data yang di butuhkan dalam laporan IPK III berupa dat pencari kerja, data lowongan kerja dan data hasil kegiatan antar kerja secara online dan manual.
- 4) Penggandaan dan penerimaan laporan, laporan IPK III yang telah disusun selanjutnya digandakan dan dikirim ke pusat, provinsi setempat dan instansi terkait lainnya.
- 5) Jaringan internet, pengguna internet untuk aplikasi Informasi Pasar Kerja Online tidak boleh digabung dengan pengguna aplikasi lain atau dipergunakan untuk kegiatan kantor (jaringan internet ini khusus dipasang diruang pelayanan Informasi Pasar Kerja Online). Anggaran Informasi Pasar Kerja Online bila sudah di biayai oleh APBD, maka biaya internet Informasi Pasar Kerja Online dari anggran pusat tidak dapat dicairkan.
- 6) *Job canvassing* ke perusahaan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja. Petugas yang telah melakukan *job canvassing* keperusahaan harus mempunyai bukti kunjungan yang dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel dari perusahaan pada surat perintah tugas yang diberikan oleh pimpinan. Lowongan dari hasil *job canvassing* yang diperoleh harus di masukan kedalam aplikasi Informasi Pasar Kerja Online secara lengkap.
- 7) Monitoring dan evaluasi penempatan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja yang di tunjuk sesuai dengan surat perintah tugas dari

Kepala Dinas. untuk melihat dan mengevaluasi hasil penempatan yang telah dilakukan di perusahaan pengguna Informasi Pasar Kerja Online.

- 8) Sosialisasi/ pembinaan ke bursa kerja dilakukan oleh kepala bidang/ kepala seksi/ pengantar kerja/ petugas antar kerja berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas. Sosialisasi/ pembinaan dapat dilakukan ke bursa kerja khusus (bursa kerja satuan pendidikan menengah dan tinggi).
- 9) Laporan dan konsultasi ke Provinsi dilakukan oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi sesuai dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas setempat.

Penerapan program Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten Pasuruan sendiri telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja yang telah di jelaskan di buku Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Mulai dari penetapan personil sampai dengan pelaporan dan konsultasi ke provinsi telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ke bursa kerja belum sepenuhnya di laksanakan oleh Dinds Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan. Dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan tentang program Informasi Pasar Kerja Online di masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Program Informasi Pasar Kerja Online di laksanakan diseluruh Indonesia melalui PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang membahas tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Informasi Pasar Kerja Nomor KEP.268/PPTK/XII/2012. Dalam pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online masing-masing daerah wajib mengelolah program tersebut yang

didalamnya mengatur tentang informasi seputar pasar kerja. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang menerapkan program tersebut untuk memberikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja. Penerapan program Informasi Pasar Kerja Online di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan di khususkan pada pencari kerja dimana petugas pengantar kerja atau petugas yang menangani pelayanan program Informasi Pasar Kerja Online memberikan informasi atau memberikan konsultasi seputar pasar kerja. Sebelumnya pencari kerja di arahkan untuk membuat surat angkatan kerja atau yang biasa di sebut dengan AK-1. Pembuatan kartu AK-1 ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pencari kerja mulai foto berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, KTP asli, ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir. Data tersebut yang nantinya akan di input dalam program Informasi Pasar Kerja Online dan pencari kerja dapat mencetak kartu AK-1 yang dipergunakan untuk mencari kerja. Data pencari kerja yang telah masuk dalam program Informasi Pasar Kerja Online yang dapat di pergunakan untuk mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan daerah masing-masing sesuai minat dan keahlian pencari kerja.

Latar belakang terciptanya program Informasi Pasar Kerja Online adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pasar kerja hanya dengan mengakses program Informasi Pasar Kerja Online sesuai dengan minat daerah masing-masing. Seperti yang di jelaskan oleh Korten dalam (Akib dan Tarigan, 2000:12), bahwa suatu progam akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian

dari 3 unsur implementasi program yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok manfaat dengan organisasi pelaksana. Sama halnya dengan Program Informasi Pasar Kerja Online bertujuan untuk memberikan hasil sesuai yang diinginkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pasar kerja.

Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang berkembang di masyarakat tentang pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online yang bertujuan untuk mempermudah mendapatkan informasi tentang pasar kerja masih belum secara luas diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan informasi tentang manfaat dan tujuan IPKOL ini. Seperti yang di jelaskan oleh Korten dalam (Akib dan Tarigan, 2000:12) kesesuaian dari 3 unsur implementasi program yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok manfaat dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Dalam program Informasi Pasar Kerja Online yang berjalan di Kabupaten Pasuruan terdapat kesenjangan informasi antara Dinas Tenaga Kerja dengan masyarakat tentang manfaat program IPKOL jadi sebagian dari masyarakat Kabupaten Pasuruan masih belum tau betul tentang apa manfaat dari program IPKOL tersebut. Karena dalam penerapannya pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan bersosialisasi melalui SMK-SMK yang

berada di Kabupaten Pasuruan. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dalam hal ini petugas pengantar kerja yang memberikan pelayanan di bidang IPKOL sudah cukup memuaskan dalam memberikan pelayanan seputar informasi pasar kerja dan konsultasi mengenai pekerjaan. Ketiga, kesesuaian antara kelompok manfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. Dalam hal diatas antara kesesuaian untuk memperoleh output atau hasil dari program Informasi Pasar Kerja Online adalah untuk memberikan informasi terupdate seputar lowongan pekerjaan di Kabupaten Pasuruan akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat informasi lowongan pekerjaan yang sudah tidak berlaku atau pendaftarannya sudah di tutup yang hanya akan membingungkan pencari kerja. Dengan adanya hal tersebut lebih baiknya petugas pelaksana atau perugas pengantar kerja menghapus informasi lowongan pekerjaan yang sudah tidak belaku tersebut dengan yang baru.

b) Jenis Layanan dalam Pelaksanaan Program Informasi Pasar Kerja Online

Pelayanan publik seperti halnya dengan program Informasi Pasar Kerja Online yang bertujuan untuk melayani masalah tenaga kerja tentunya membutuhkan pelayanan yang prima, baik dari petugas pemberi layanan maupun

tentang fasilitas yang diberikan sehingga pihak yang menerima layanan merasa puas dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan. Seperti penjelasan menurut Siagian (1998:53) pelayanan publik secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dengan demikian pelayanan publik merupakan upaya memberikan kesenangan-kesenangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan yang diberikan agar pelanggan dapat merasa puas. Program Informasi Pasar Online bukan hanya melayani tentang informasi lowongan pekerjaan didalam program tersebut juga membahas tentang beberapa hal diantaranya:

1. Konsultasi mengenai peraturan tenaga kerja memberikan informasi mengenai persyaratan kerja dan memberikan pengarahan seputar dunia kerja sehingga pencari kerja baru atau yang belum mempunyai pengalaman kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selain itu agar pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya;
2. Analisis dan bimbingan jabatan, dalam analisis dan bimbingan jabatan memberikan arahan atau mempelajari dan memberikan penilaian yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur;
3. Layanan antar kerja lokal yaitu mekanisme layanan antar kerja dalam lingkup penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Contoh: pencari kerja yang

berasal dari Kabupaten Pasuruan dan ingin mencari kerja pada lingkup Kabupaten Pasuruan;

4. Layanan antar kerja daerah, mekanisme layanan antar kerja dalam lingkup penempatan tenaga kerja antar daerah dalam lingkup luar Kabupaten Pasuruan. Contoh: pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan dan ingin mencari kerja di luar daerah Pasuruan di berikan pengarahannya mengenai persyaratan yang dibutuhkan dan sesuai dengan bidang keahlian dan pendidikan sesuai dengan kemampuan pencari kerja tersebut;
5. Layanan antar Negara, mekanisme pelayanan antar kerja dalam lingkup penempatan tenaga kerja antar Negara. Contoh: TKI atau Tenaga Kerja Indonesia; dan
6. Perizinan tenaga kerja asing, adalah pelayanan wajib lapor keberadaan tenaga asing yang berkerja dalam perusahaan di kabupaten pasuruan yang bertujuan untuk mengembangki upaya pemerintah mendatangkan lebih banyak modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Pelayanan perizinan tenaga kerja asing dengan perwakilan perusahaan datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyerahkan atau mengambil dokumen terkait dengan tenaga kerja asing tersebut.

Dari penjelasan diatas mejelaskan bahwa dalam program Informasi Pasar Kerja Online mempunyai berbagai program layanan bukan hanya sekedar untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang di berikan dalam Program Informasi Pasar

Kerja Online bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Seperti pendapat yang dikemukakan Munir (1991:12) pelayanan bisa dikatakan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Karena pelayanan publik adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan dapat memenuhi kebutuhan yang masyarakat inginkan dan masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

c) Pengendalian dan Pelaporan Tentang Program Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)

Proses pengendalian dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah program Informasi Pasar Kerja Online sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau belum. Berdasarkan hasil pengendalian dan pelaporan yang dilakukan tersebut akan diketahui tentang kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Informasi Pasar Kerja Online. Sehingga dalam proses pengendalian dan pelaporan tersebut dapat berguna untuk melihat adanya kesenjangan serta untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem. Program Informasi Pasar Kerja Online merupakan program baru dalam memberikan pelayanan melalui media internet yang sebelumnya menggunakan sistem manual yang ditulis dan di tempel pada papan pengumuman pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pencari kerja datang langsung ke kantor dinas.

Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Informasi Pasar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2017:5), adalah pengelolaan informasi pasar kerja (IPK) dalam bentuk pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan secara online dengan menggunakan sistem komputerisasi yang dibangun secara khusus dengan memanfaatkan bantuan internet. Proses pengendalian dan pelaporan program Informasi Pasar Kerja Online dilakukan dengan mengamati jalannya program tersebut dengan menggunakan sistem pelaporan dan terjun secara langsung ke lokasi agar memperoleh data sesuai yang diinginkan. Kegiatan pengawasan pada lapangan tersebut untuk mengetahui terhadap kesenjangan antara kinerja aktual yang benar-benar diberikan dengan kinerja potensial yang seharusnya diberikan. Seperti pendapat yang di kemukakan oleh Zauhar (1993:11), yaitu berkaitan tentang tujuan pengendalian dan pelaporan adalah untuk mengetahui dari dekat pelaksanaan program dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan.

d) Sasaran dan Manfaat Program Informasi Pasar Kerja Online

Program Informasi Pasar Kerja Online ini telah ditentukan mengenai batasan untuk mencapai suatu tujuan program. Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi yang ideal penerapan terhadap sasaran akan baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dalam jangka waktu panjang serta berorientasi pada hasil nyata. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Pasuruan menentukan tentang sasaran dari program Informasi Pasar Kerja Online yaitu:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja serta sarana dan prasarana pelatihan kerja;
2. Meningkatkan perluasan kerja dan kesempatan kerja;
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam hubungan industrial kebijakan;
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meningkatkan kerjasama dengan daerah tujuan Transmigrasi agar lokasi tujuan Transmigrasi mempunyai akses yang baik dengan pusat perekonomian.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan tersebut kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan merumuskan cara mencapai sasaran yaitu berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan disini merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran sesuai dengan misi yang ada untuk jangka waktu lima tahun yang diarahkan kepada penurunan angka kemiskinan guna peningkatan mutu sumber daya dan kesejahteraan sosial.

Sedangkan manfaat dari Program Informasi Pasar Kerja Online ini adalah bermanfaat bagi semua masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui media internet tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Sehingga dengan adanya program IPKOL tersebut dapat memudahkan

masyarakat dalam mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar pekerjaan. Apabila pencari kerja sudah menemukan perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, maka untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai pekerjaan yang dipilih harus datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan. Ketika pelamar datang pada kantor dinas maka akan diberikan arahan atau penjelasan oleh petugas pengantar kerja seputar pekerjaan yang diinginkannya tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Program Informasi Pasar Kerja Online yang Dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

a) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Informasi Pasar Kerja Online

Faktor pendukung implementasi program Informasi Pasar Kerja Online ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor pendukung internal berkaitan dengan adanya dukungan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan yang memberikan apresiasi terhadap adanya program ini. Kepala dinas juga melakukan monitoring langsung kelapangan untuk melihat sejauh mana tugas dan instruksi yang diberikan terlaksana dengan baik. Program ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku penanggungjawabnya, sehingga memang diperlukan suatu mentoring

secara intensif agar implementasi ini terlaksana dengan baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sangat mendukung adanya program ini yang dikelola dengan baik dan tidak perlu diragukan kejelasannya, mengingat sekarang banyak penyalahgunaan informasi terkait dengan informasi pasar kerja. Kepala Dinas juga mendukung program ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sedangkan faktor pendukung eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar aktor-aktor pembuat kebijakan ini, yaitu adanya dukungan dari perusahaan-perusahaan yang cukup membantu dalam implementasi program Informasi Pasar Kerja Online ini. Tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan sejumlah perusahaan, program Informasi Pasar Kerja Online ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena ini faktor pendukung eksternal sangat diperlukan dalam rangka implementasi program Informasi Pasar Kerja Online agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Informasi Pasar Kerja Online

Dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan atau program tidak selamanya berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat yang dapat mengakibatkan suatu kegagalan dalam implementasi suatu program. Faktor penghambat ini dibedakan menjadi dua yaitu faktor

penghambat internal dan eksternal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini juga memiliki hambatan dalam implementasi program Informasi Pasar Kerja Online. Faktor penghambat internal dalam implementasi program ini antara lain adalah kurangnya kualitas dari sumber daya manusia dari petugas pengantar kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan. Sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu berkaitan dengan adanya masalah jaringan internet. Masalah jaringan yang dimaksud adalah program Informasi Pasar Kerja Online ini digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan tentunya pada jam tertentu seperti halnya jam-jam sibuk kantor untuk mengakses program ini terkendala. Dengan demikian sangat jelas bahwa masalah jaringan merupakan salah satu penghambat dalam pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam sebuah penerapan sistem elektronik pada proses apapun tentunya memiliki dampak tertentu, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi program Informasi Pasar Kerja Online saling mempengaruhi untuk menuju kearah inovasi yang lebih baik dan terus berusaha untuk meningkatkan agar dalam implementasi program dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini sebaiknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan lebih aktif dalam memberikan informasi tentang program Informasi Pasar Kerja Online agar masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Pasuruan mengerti maksud dan tujuan

dilaksanakannya program Informasi Pasar Kerja Online untuk mengetahui tentang lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masing-masing pencari kerja. Sistem informasi dan sistem aplikasi adalah suatu hal yang penting dalam pengambilan keputusan bagi manajemen pelayanan publik, sama halnya dengan program Informasi Pasar Kerja Online.